

GENDER DALAM BINGKAI DRAMA *

Oleh Ashadi Siregar

The theatre under patriarchy has been defined as violent conflict, the *agon*; the constant battle between the stronger and the weak; the *angst* of separation from what is meaningful in daily life. Having created the father-god, the sons soon began to rail against his harsh judgmentalness, his unavailability, his lack compassion. The battle segments of the old seasonal rites come to be the center this drama. There was mortal conflict between the old authority figure and the young man lusting after freedom and power...(Karen Malpede, 1983)¹

Teater dapat dibicarakan dari sisi teknikalitas, seperti mengenai teknik pengwujudannya, seperti antara format realis dengan surealis atau absurd, atau antara yang konvensional dengan eksperimental, dan seterusnya. Biasa juga pendekatan atas suasana bangunan dramatik seperti antara tragedi dengan komedi.

Persoalan-persoalan yang muncul dari aspek ini biasanya menjadi urusan keseriusan estetika. Seperti disebutkan Artaud berikut:

The contemporary theater is decadent because it has lost the feeling on the one hand for seriousness and on the other for laughter; because it has broken away from gravity, from effects that are immediate and painful – in a word, from Danger.

Because it has lost a sense of real humor, a sense of laughter's power of physical and anarchic dissociation.

Because it has broken away from the spirit of profound anarchy which is at the root of all poetry.²

Pada sisi lain, teater dilihat dari pemaknaannya dalam konteks sosial dan kultural. Untuk itu teater hadir dalam fungsi instrumental, di satu sisi sebagai sarana ritual, bersifat penataan hubungan komunitas secara vertikal dengan yang di "atas". Dengan sendirinya sarana ini dipandang dan diproses secara serius. Pada sisi lain, teater sebagai sarana bermain-main dari komunitas, berfungsi horisontal sebagai upaya memelihara hubungan di antara anggota komunitas.

Dari kedua akar ini kemudian budaya teater dipelihara dan dikembangkan. Sifatnya yang utama adalah ketidak-terpisahan teater dengan komunitasnya sebagai sarana memelihara nilai-nilai yang menjadi landasan dan identitas komunitas. Makna (*meaning*) sebagai apa yang dianggap benar dari suatu teater dengan sendirinya paralel atau dimaksudkan untuk menjaga nilai dominan dalam komunitas. Dengan begitu urutan berpikir dalam keberadaan teater adalah nilai dominan dalam komunitas, pemaknaan nilai dominan, dan fungsi teater.

Maka dapat dipahami bagaimana nilai atau alam pikiran patriarkhi merasuk pula ke dalam teater. Dapat dilihat dari leluhur teater modern, teater klasik Yunani, pada dasarnya berfungsi sebagai ritual dengan mewujudkan mitologi para dewa (*dei*) dan raja (*rex*), sebagai rasionalisasi dari kehadiran teater hadir dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ritual yang mengukuhkan kekuasaan patriarkhi di kerajaan dewa, setengah dewa atau manusia,

* Disampaikan pada Lokakarya Perempuan Penulis Naskah Drama Berperspektif Gender, Institut Seni Indonesia Yogyakarta – Dewan Kesenian Jakarta, Yogyakarta 13 – 15 Januari 2005

¹ Malpede, Karen, ed., (1983) ed., *Women in Theatre, Compassion & Hope*, Limelights Editions, New York, p. 1

² Artaud, Antonin (1958) *The Theater and its Double*, Grove Press, Inc, New York, p. 42

menjadikan teater sebagai instrumen kekuasaan. Karenanya, teater tidak terpisah dari alam pikiran lingkungan yang menjadi ruang hidupnya, sebagaimana setiap ekspresi yang merupakan arus utama (*mainstream*) akan paralel dengan arus utama dalam kehidupan sosial (termasuk ekonomi dan politik).

Dengan begitu, pertanyaan awal dalam kehadiran setiap bentuk ekspresi adalah mengenali arus utama dalam ruang sosial (*social-sphere*), berikutnya setuju atau tidak setuju atas arus utama tersebut. Sikap bersetuju atau tidak setuju ini biasa disebut sebagai pilihan paradigmatis seorang kreator. Baru kemudian sang kreator akan menentukan apakah akan menjadi bagian dari arus utama tersebut, ataukah berusaha keluar sehingga menjadi arus lain (*sub-altern*).

Manakala seseorang memasuki ruang sosial yang didominasi nilai patriarki akan menemukan masalah mendasar yaitu ketidak-adilan dalam berbagai wujud yang menjadi landasan dalam perspektif gender.³ Bagaimana mengartikan ketidak-adilan? Yaitu melalui adanya ketidak-setaraan (*inequality*) dalam kehidupan sosial, pada satu sisi dilihat dari kegagalan seseorang mendapatkan haknya, pada sisi lainnya adanya kekuasaan yang menghambat dalam pengwujudan hak seseorang. Ketidak-adilan adalah pembiaran atau tindakan yang menyebabkan seseorang atau kolektivitas tidak dapat memperoleh dan mewujudkan hak-haknya.

Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap kenyataan perlu dilihat dengan perspektif kritis dan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya dalam situasi sosial. Parameter untuk mengidentifikasi masyarakat tidak ekual secara sederhana adalah melalui kondisi hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya dalam situasi sosial. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama faktor fisik, kedua faktor akses/interaksi personal, dan ketiga faktor struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas.

Faktor pertama, bersumber dari kondisi fisik. Pengwujudan hak dapat terhambat akibat keterbatasan fisik antara lain dialami oleh kalangan berbeda kapasitasnya (*different abilities, difable*), sebutan untuk person yang mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kapasitas dalam interaksi sosial. Begitu pula anak-anak dan perempuan atau seseorang yang karena faktor fisik mengalami diskriminasi sering mengalami ketertindasan sehingga kehilangan hak-haknya.

Faktor kedua, hambatan yang bersumber dari kondisi status sosial seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah, atau kedudukan ekonomi yang lemah, serta status sosial yang rendah mengakibatkan seseorang mengalami keterbatasan dalam relasi sosial, berikutnya membawa implikasi atas ketiadaan akses terhadap fasilitas yang ada di ruang publik. Dengan begitu tidak dapat memanfaatkan hak-haknya atas fasilitas tersebut.

Sedang faktor ketiga bersifat struktural dilihat dari kondisi relasi-relasi sosial yang berlangsung di ruang publik yang melahirkan konstruksi sosial dalam memperlakukan manusia, dengan menganggap ketidak-setaraan sebagai suatu kebenaran. Konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga dianggap sebagai hal yang normal, maka keberadaan kelompok yang tidak dapat mewujudkan hak-haknya dengan sendirinya tidak ternampak.

Demikianlah, di balik setiap kehidupan masyarakat, berlangsung interaksi bersifat struktural. Struktur fisik dapat dilihat dalam kasat mata, sementara struktur sosial hanya dapat dipahami melalui perspektif sosial. Dengan perspektif sosial perlu dilihat bahwa kedudukan

³ Kupasan mengenai perspektif gender pada bagian ini diolah dari Siregar, Ashadi (2002) *AIDS, Gender & Kesehatan Reproduksi: Pintu Menghargai Manusia*, Ford Foundation – Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya, Yogyakarta

setiap person hanya dapat seimbang dan setara (*equal*) jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan dapat berupa kekuatan fisik (senjata, jumlah pendukung lebih banyak, dsb), kekuasaan negara, kekuasaan modal/ekonomi, dan kekuasaan kultural (komunalisme, fanatisme agama). Perspektif struktural menjadikan setiap wacana diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai perifer yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya.

Kekuatan tidak ternampak sebagai suatu konstruksi sosial merupakan alam pikiran yang mendominasi landasan kebenaran yang dianut secara kolektif, lebih jauh mempengaruhi seluruh cara pandang dalam menghadapi nilai dan kenyataan. Mengapa kebijakan dan pelayanan publik mengabaikan kaum atau anak-anak yang menjadi pekerja jalanan misalnya, merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang menerima ketidak-setaraan sebagai landasan kebenaran. Kekurangan secara fisik dianggap sebagai urusan individual atau masalah privat (keluarga), sehingga harus bertarung sendiri dalam setiap situasi sosial. Begitu pula ketidak-mampuan seseorang untuk mendapatkan akses akan pengwujudan hak-haknya dipandang sebagai urusan individual, bukan sebagai sesuatu yang melanggar azas kebenaran kolektif.

Setiap relasi sosial merupakan fakta yang selamanya dilihat dalam dataran kebenaran. Sedang kebenaran merupakan suatu nilai yang didefinisikan untuk tujuan idealisasi. Dengan kata lain, makna (*meaning*) kebenaran menjadi dasar bagi posisi lebih dominan dalam setiap relasi sosial. Pihak *yang benar*, memiliki kekuasaan untuk memiliki pembenaran bagi tindakannya dalam situasi sosial yang diciptakan. Karenanya suatu situasi sosial memiliki kualitas yang parameternya ditetapkan atas dasar definisi nilai kebenaran.

Dari sini masalah nilai kebenaran perlu dilihat dalam 3 aras, pertama pada aras empiris, kedua pada aras legalitas, dan ketiga pada aras rasa keadilan. Kebenaran empiris bagi kalangan positivis cukup dilihat dari adanya terjadi dalam ruang dan waktu yang dapat dibuktikan dengan inderawi (*sense*) manusia. Prinsip jurnalisme dan ilmiah konvensional bertumpu pada kebenaran empiris. Pembuktian sesuatu situasi sosial memang benar ada, merupakan titik awal dalam kerja jurnalisme dan akademik. Seluruh prinsip metodologi sosial yang konvensional atau klasik pada dasarnya bertumpu pada upaya mendapatkan situasi sosial yang ada secara empiris.

Kebenaran bersifat empiris penting sebagai titik berangkat, tetapi tidak memadai dalam menata kehidupan sosial. Lalu dari sini dikenal kebenaran lainnya. Untuk itu dikenal kebenaran legalitas bertolak dari hukum positif, dengan memperbedakan tindakan atau perbuatan manusia dengan ukuran hukum formal. Setiap perbuatan manusia dinilai dari ketentuan yang dirumuskan dengan kaidah hukum formal, baik hukum positif maupun hukum agama (fikih) dan hukum tradisional (adat). Parameter dari kebenaran legalitas dilihat dari kesesuaian perbuatan individu dalam situasi sosial yang tertata (*social order*), karenanya penyimpangan dari standar merupakan perbuatan salah yang harus mendapat sanksi. Hukum agama dan adat memiliki sifat primordial, karenanya dalam kehidupan modern berlaku hukum positif sebagai sumber kebenaran legalitas. Dengan kebenaran ini kedudukan manusia ditempatkan di bawah kaidah yang dirumuskan, sehingga sering terjadi makna kehidupan manusia tidak perlu dilihat, sebab yang dinilai adalah perbuatan empiris.

Sedang kebenaran aras ketiga yaitu atas dasar rasa keadilan dilihat melalui keberadaan manusia secara total dalam kaitan dengan hak-haknya sebagai manusia. Kebenaran semacam ini bertolak dari pendefinisian makna kemanusiaan. Perbuatan apalagi yang bersifat momentum, hanya merupakan bagian penggalan kecil dari kehidupan seseorang. Sedangkan kehidupan merupakan proses panjang dan mendalam menyangkut totalitas kehidupan dalam

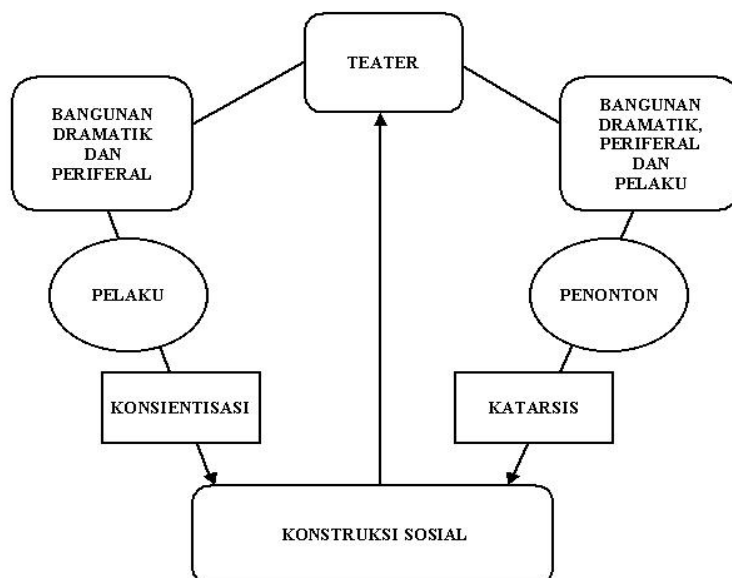
dimensi fisik dan dimensi psiko-sosial yang berada dalam masa lalu, kini dan masa datang, berada dalam konteks dunia empiris dan dunia simbolik. Dengan kata lain, setiap manusia hadir dalam kaitan kontekstual antara dunia-dalam (*inner-world*) dan dunia-luar (*outer-world*)nya, yang perlu dilihat maknanya secara total dan kontekstual.

Permasalahan gender biasa dilihat sebagai cerita tentang nasib perempuan. Ini memang benar, tetapi lebih dari itu adalah mengenai kondisi struktural suatu masyarakat yang tidak adil, dengan fokus perhatian terhadap perempuan yang menjadi korban. Dengan kata lain, kondisi struktural ini hanya dapat dipahami jika ada kepekaan terhadap kondisi ketidak-adilan struktural di satu pihak, dan korban pada pihak lain. Sumber kekuasaan sebagai penyebab ketidak-adilan struktural dapat bermacam-macam, mulai dari institusi birokrasi negara, bisnis, atau bagian masyarakat sendiri (secara fisik dan kultural). Demikian pula yang menjadi korban dapat berbagai latar belakang, seperti perempuan, anak-anak, petani, buruh, penduduk di sekitar pabrik, dan lainnya.

Dengan demikian kepekaan gender hanya dapat dimulai dari perspektif mengenai ketidak-adilan struktural. Pengungkapan perempuan tanpa perspektif gender dapat melahirkan eksploitasi untuk tujuan ekonomi (komodifikasi) perempuan. Penampilan perempuan di media massa dapat dilihat dari makna yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi yang merendahkan perempuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai obyek dari pihak yang berkuasa khususnya ekonomi. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka (*overt*) dan manifes, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup (*covert*) dan tersembunyi (*latent*), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialisme. Dengan demikian komodifikasi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitik-beratkan pada bagian atau keadaan fitur (*feature*) tubuh, bukan pada figur (*figure*) personifikasi dan peran sosialnya.

Karenanya masalah mendasar dari kepekaan gender tidak semata-mata menjadikan perempuan sebagai fokus, tetapi lebih jauh yaitu menyangkut kepekaan atas kondisi ketidak-adilan akibat ketidak-setaraan dalam struktur sosial. Bahwa perempuan menjadi korban dalam kondisi tersebut, merupakan tahap berikutnya. Itulah sebabnya dengan kepekaan gender, biasanya seseorang juga akan menaruh perhatian terhadap nasib anak-anak, kaum minoritas, korban kekerasan kolektif dan rakyat di kawasan peperangan.

Teater modern dapat dilihat dari fungsinya yang bersifat internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, permainan dalam teater berfungsi bagi setiap orang yang bermain dalam proses kediriannya. Teater semacam ini menjadi berfungsi terapi psikologis bagi pelakunya, atau sebagai metode penyadaran-batin/konsientisasi (*conscientization*). Sedangkan kehadiran teater yang berfungsi secara eksternal bagi penonton, adalah sejauh mana memberikan dampak maksimal pada tingkat katarsis. Kedudukan teater dapat digambarkan berikut ini:



Saat ini teater modern bertumpu pada naskah lakon, yaitu bangunan dramatik yang disusun sebagai teks tertulis. Persoalan dalam mewujudkan bangunan dramatik dalam teks tertulis ini dengan sendirinya bertolak dari kaidah metode spesifik, bersifat teknis dan estetika. Sebagai sub-disiplin dalam pengetahuan teater, penulisan teks teater menuntut tidak semata berkaitan dengan metode, tetapi juga berkaitan dengan isi (*content*) yang bersifat kontekstual dalam dimensi sosial.

Teater sebagai suatu bangunan dramatik, pada hakikatnya bukan sekadar tiruan penggalan kehidupan sehari-hari (*daily life*), kendati kenyataan ada yang bersifat dramatis. Dalam kaitan dengan tingkat suasana yang dihidirkannya, bangunan dramatik dari setiap teater dapat dilihat dalam dua aspek, pertama dari ruang suasana (*sphere*) berupa melodrama dan *farce* yang lebih dekat sebagai tiruan kehidupan sehari-hari, dan ekstrimitas dikotomis tragedi dan komedi, serta yang ketiga sebagai *satyr play*. Antara melodrama dan *farce* atau tragedi dan komedi, merupakan pengwujudan suasana di dalam ruang dramatik yang penting. Tetapi dia hanyalah berfungsi untuk mengantarkan aspek kedua, yaitu substansi sebagai makna mengapa teater harus dihadirkan. Substansi dari bangunan dramatik bukan sekadar cerita terstruktur, tetapi juga berkaitan dengan intensi dan cara pandang kreator dalam menghadapi kebenaran. Kebenaran tentang dan macam apa yang dianut oleh seorang kreator dalam mewujudkan bangunan dramatnya.

Malpede sebagai dikutip di atas menyimpulkan teater yang dipengaruhi alam pikiran patriarkhi melalui dua hal yaitu *agon* (penderitaan) dan *angts* (kecemasan) yang dilahirkan dari konflik kekerasan dan kekuasaan. Dengan kata lain, konflik dramatis yang menjadi jiwa teater patriarkhi bertumpu pada kedua dimensi tersebut. Kekerasan merupakan metode dalam setiap konflik, sementara upaya merebut atau terlempar dari kekuasaan menjadi pusat dari permasalahan.

Contoh soal dari lakon *Oedipus (at Colonus dan Rex)* dengan pendekatan konvensional kaidah estetika dilihat dari bangunan dramatnya sebagai suatu tragedi. Dalam mempelajari naskah Sophocles ini adalah berfokus pada nasib Oedipus yang terperangkap dalam ketidakberdayaannya, pilihan apapun yang dilakukannya hanya bermuara pada penderitaannya. Seperti ditulis berikut ini:

From *Oedipus Rex*, a play of faultless construction in which the leading character is driven to his doom by the ineluctable series of his own choice, Aristotle chiefly draws his definition of the tragic hero: "a man who is highly

renowned and prosperous, but one who is not pre-eminently virtuous and just, whose misfortune, however, is not brought upon him by vice and depravity, but by some error of judgment or frailty.”⁴

Anatomi tragedi ini menjadi tumpuan utama dari bangunan dramatik. Sementara dengan cara lain, bangunan dramatik dapat dilihat dari permasalahan dalam menghadapi kekuasaan. Nasib yang dialami bukan tragedi, tetapi kecemasan akut dari anak laki-laki dalam menghadapi kekuasaan ayah, suatu gambaran untuk alam pikiran patriarkhi.

Karenanya jika ini yang menjadi arus utama, dengan sendirinya untuk keluar darinya adalah melalui perumusan baru mengenai konflik dramatis. Bagaimanakah konflik dramatis dalam perspektif gender? Andaikata kita berniat untuk menapsir-ulang *Oedipus* misalnya, untuk membentuk bangunan dramatik baru keluar dari arus utama sebelumnya, tidak cukup hanya dengan mengubah tragedi menjadi komedi. Karena yang utama adalah bagaimana cara pandang kita mengenai dua sisi mata koin: kekerasan dan kekuasaan.

Disini makna kekerasan dan kekuasaan perlu dilihat dari hakekatnya yaitu sebagai interaksi tidak seimbang di antara pihak-pihak dalam suatu kehidupan sosial. Suami memukul isterinya misalnya, mungkin bagi sebagian orang dipandang sebagai bentuk pendidikan dari sang imam yang mendefinisikan suami adalah imam dalam keluarga. Tetapi dengan perspektif gender, aksi suami itu dipandang sebagai kekerasan, sebab secara struktural sang suami dalam posisi hegemonik, dan isteri tidak berdaya (*powerless*). Perspektif gender tidak melihat suami dengan kekuatan fisiknya, tetapi keberadaannya dalam konstruksi sosial yang menempatkan dirinya dalam posisi hegemonik. Konstruksi sosial ini selamanya berada pada salah satu atau lebih ruang kekuasaan negara, modal, atau komunal yang memberikan dasar pembenaran atas suatu tindakan atau kenyataan. Dengan demikian fakta kekerasan dilihat dalam konteks struktural, dimana salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih. Kekuatan fisik belum menjadi kekuasaan hegemonik, sepanjang tidak memiliki kaitan dengan kekuasaan negara, ekonomi atau komunalisme yang memberikan konstruksi kebenaran.

Kembali kepada contoh lakon *Oedipus*, pergulatan *Oedipus* melalui metode kekerasan dalam menghadapi kekuasaan pada hakikatnya tidak keluar dari konstruksi kebenaran atas kekuasaan tersebut. Dengan begitu yang muncul adalah kelahiran penguasa yang menggantikan penguasa dengan kekuasaan sebelumnya, tidak memberikan konstruksi kebenaran yang berbeda mengenai kekuasaan.

Konstruksi sosial yang menguasai alam pikiran mengenai suatu kebenaran menjadi ladsan atas pembenaran atas tindakan atau kehidupan. Dengan begitu ketidak-adilan dari suatu ketidak-setaraan tidak dapat dihayati. Sebagai ilustrasi, makna poligami dipandang sebagai kebenaran, sepanjang suami bersikap dan bertindak adil atas isteri-isterinya. Konstruksi sosial ini mudah dipatahkan, dengan pertanyaan dengan azas kesetaraan, antara siapa dengan siapa? Persoalannya, kesetaraan dilihat bukan di antara para isteri, dengan posisi suami berada di atas dari para isterinya, dengan keadilan yang dibagikannya. Kesetaraan harus dilihat antara sekian orang perempuan dengan satu makhluk laki-laki itu. Dari ini makna yang berasal dari konstruksi sosial harus didekonstruksi.

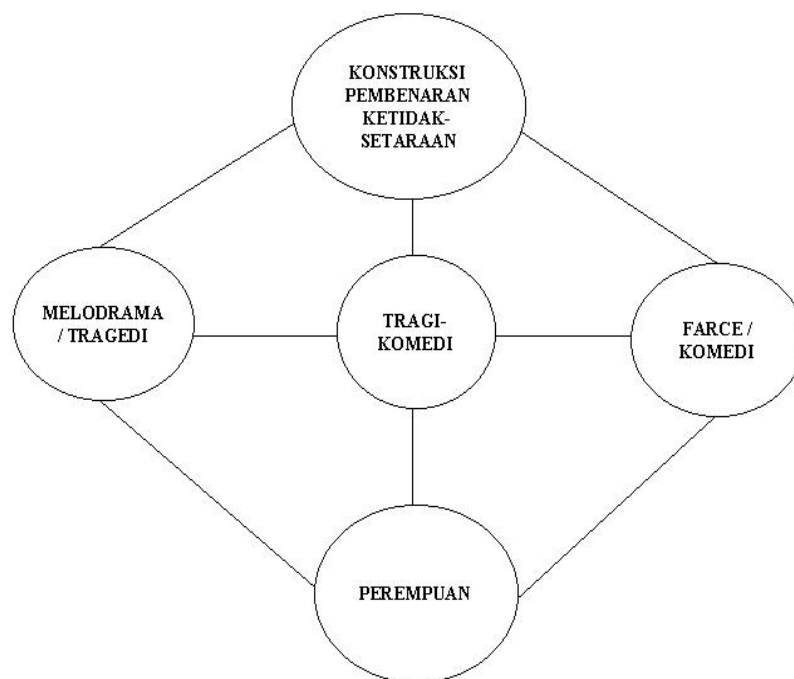
Berbagai dimensi atas ketidak-setaraan yang diterima dalam konstruksi sosial baik bersifat personal maupun kolektif, di ruang publik (*public-sphere*) maupun ruang pribadi (*private-sphere*). Konstruksi sosial yang berasal dari kekuasaan patriarkhi mengakibatkan struktur sosial yang tidak adil dan bersifat tidak setara di antara mayoritas dan minoritas dalam konteks ras, anutan agama, nilai kultural, dan kecenderungan seksual. Pengertian mayoritas – minoritas disini tidak atas dasar jumlah (kuantitatif) saja, tetapi juga dilihat dari kondisi kuat – lemah (kualitas) dari inter-relasi secara struktural. Ketidakadilan gender pada

⁴ Roberts, Vera Mowry (1962) *On Stage: A History of Theatre*, Harper & Row, Publishers, New York, p. 34

dasarnya merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang bersifat menindas terhadap minoritas. Ilustrasi dari konstruksi sosial semacam ini di antaranya dapat dilihat melalui kebijakan negara dalam masalah agama, yang memberi fasilitas lebih besar dengan dalih jumlah penganutnya mayoritas. Sementara dalam prinsip kesetaraan, kebijakan negara harus berpihak pada minoritas. Untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan, arus dalam konstruksi sosial yang memberi keistimewaan kepada mayoritas harus dibalik, dengan upaya secara bersengaja memberi peluang bagi minoritas untuk menghadirkan diri dalam struktur sosial. Kata kunci dalam upaya ini adalah menyediakan peluang bagi minoritas atau korban struktural agar dapat ambil bagian (*sharing*) dalam setiap pola kehidupan sosial, dalam prinsip advokasi untuk mengangkat yang lemah (*empowerment*). Dengan demikian penajaman lensa untuk menangkap ketidak-setaraan ini yang bersumber dari konstruksi patriarkhi akan menemukan ketidak-adilan di satu pihak dan tindakan afirmatif (*affirmative action*) pada pihak lain.

Tindakan afirmatif ini penting sebab masalah mayoritas – minoritas ini tidak sepenuhnya atas dasar jumlah populasi. Jumlah kaum perempuan dalam suatu masyarakat boleh jadi lebih banyak dibanding laki-laki, tetapi posisi dalam konstruksi sosial menjadi *powerless* akibat nilai yang mendasari peran-peran sosial, karenanya berada dalam posisi minoritas. Dalam konstruksi sosial patriarkhi, laki-laki memiliki privelese peran di ruang publik sedangkan perempuan ditempatkan dalam peran di ruang privat. Di ruang publik dengan peran yang dikuasai oleh kaum laki-laki maka kebijakan publik akan berorientasi pada kepentingan laki-laki. Ini akan berlangsung dalam sektor politik, ekonomi dan kehidupan kultural.

Kerangka pemikiran mengenai perspektif gender dalam teater dapat digambarkan berikut ini:



Titik tolak dalam proses kreatif ini adalah menemukan konstruksi sosial yang bersumber dari kekuasaan patriarkhi yang menjadikan ketidak-setaraan diterima sebagai kebenaran. Secara spesifik, kelompok perempuan merupakan fokus yang ditempatkan dalam relasi sosial yang bersifat tidak setara tersebut. Proses kreatif pada dasarnya bertolak dari

perlawanan terhadap konstruksi sosial yang dominan sehingga perlu memberikan definisi baru (dekonstruksi) tentang kebenaran.

Pengasahan perspektif atas posisi ketidak-setaraan perempuan dalam konstruksi sosial ini dengan sendirinya merupakan proses yang penting. Untuk itu dapat dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai kehidupan, dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, sebagaimana dilakukan dalam kajian ilmu sosial kritis. Tetapi itu saja tentunya tidak cukup.

Hal yang tidak dapat diabaikan adalah proses mewujudkan tragedi, komedi atau tragi-komedi sebagai bangunan dramatik yang mengantarkan makna kebenaran. Dengan kata lain, bangunan dramatik ini merupakan ABC-nya para kreator dalam penulisan lakon teater yang sudah selesai dalam pilihan kreatifnya. Baru kemudian relevan untuk “berontak”. Sebab dorongan substansial suatu perlawanan hanya akan dapat dilaksanakan dalam proses pengwujudan bangunan dramatik. Tanpa kemampuan dalam menciptakan bangunan dramatik ini, seluruh intensi perlawanan hanya akan menjadi keinginan berteriak dari si gagu.